

## ANALISIS KONTEKS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

Syamsul Alam <sup>1</sup>, Zulfiah Larisu <sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

Correspondent author: [syamsulalam330@gmail.com](mailto:syamsulalam330@gmail.com)

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### Abstract

Context is recognized as having an influence on the efficient operation of public administration, including the management of local government assets. However, there is a lack of research exploring the topic. The purpose of this study is to analyze the context of asset management of the South Konawe Regency government. The context of asset management is analyzed from four aspects, namely needs, root problems, opportunities, and objectives of asset management. This research uses a qualitative method approach. Data were collected through semi-structured interviews. The data analysis technique used is qualitative analysis of interactive models. The results show that there is a lack of clarity in the context of regional asset management, with differences between ideality and reality, which has the potential to harm the efficiency and achievement of long-term goals of local governments.

**Keywords:** Asset management; Context; Local government

### Abstrak

Konteks diakui berpengaruh pada operasi yang efisien dari administrasi publik, termasuk pengelolaan aset pemerintah daerah. Namun, sangat kurang penelitian yang mengeksplorasi topik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konteks pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Konteks pengelolaan aset dianalisis dari empat aspek, yakni kebutuhan, akar masalah, peluang, dan tujuan pengelolaan aset. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam konteks pengelolaan aset daerah, dengan perbedaan antara idealitas dan kenyataan, yang berpotensi merugikan efisiensi dan pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Konteks; Pengelolaan aset; Pemerintah daerah

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan aset pemerintah daerah meningkat pesat sejalan dengan tren desentralisasi fiskal dalam dua dekade terakhir. Desentralisasi fiskal dalam dua dekade terakhir telah meningkatkan pendapatan daerah, alokasi dana ke daerah, dan investasi infrastruktur (Alam et al., 2016). Aktivitas tersebut telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan aset (Satrianto et al., 2019). Perubahan tren desentralisasi telah menjadikan pemerintah daerah sebagai

pemegang aset yang besar dalam waktu yang relatif cepat. Aset-aset ini sebagai sumber daya utama pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik (Hanis et al., 2018).

Mempromosikan pengelolaan aset publik yang efisien merupakan hal yang sangat penting dan urgen bagi semua pemerintah daerah. Tujuan utama pengelolaan aset yang efisien adalah untuk mewujudkan nilai aset kepada organisasi dan pemangku kepentingannya (Msongole et al., 2022). Nilai dalam pengelolaan aset meliputi nilai ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan (International Organization of Supreme Audit Institutions, 2019). Namun, pengelolaan aset yang efisien membutuhkan konteks yang baik. Pentingnya konteks yang baik terletak pada kemampuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dapat dioptimalkan secara maksimal, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (Michaud & Michaud, 2008).

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, membutuhkan konteks yang baik untuk pengelolaan aset yang lebih efisien. Daerah ini mengalami pertumbuhan aset yang pesat sejak menjadi daerah otonom di tahun 2003. Untuk tahun 2022, nilai aset Kabupaten Konawe Selatan adalah Rp 3.652.411.211.893,36 (Rp 3,652 triliun). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016) telah menggariskan bahwa pengelolaan aset dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Namun, pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Konawe Selatan saat ini belum efisien dan belum dapat mewujudkan nilai yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingannya.

Salah satu isu penting yang belum diurai dan dianalisis dengan baik adalah bagaimana konteks pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Konteks merujuk pada kerangka atau lingkungan di mana suatu peristiwa, konsep, atau informasi ditempatkan (Gross, 2013). Keputusan kebijakan dibuat dengan memanfaatkan penilaian konteks guna menetapkan sasaran dan mengatur prioritas, serta memastikan bahwa tujuan program secara efektif diarahkan untuk mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang penting dan telah dievaluasi. Konteks dalam evaluasi kebijakan biasanya mencakup kebutuhan, permasalahan, peluang, serta kondisi dan dinamika kontekstual yang bersangkutan (Stufflebeam & Coryn, 2014). Kebutuhan melibatkan unsur-unsur yang diperlukan atau bermanfaat untuk mencapai tujuan yang dapat dipertahankan. Masalah mengacu pada rintangan yang perlu diatasi dalam mencapai dan menjaga kebutuhan yang ditargetkan. Peluang mengacu pada potensi, terutama pendanaan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah terkait. Sementara tujuan memandu pencapaian apa yang diinginkan sehubungan

dengan misi lembaga sambil tetap mematuhi norma etika dan hukum. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan yang dinamis antara konteks dan implementasi, dan karena itu memerlukan pemahaman mendalam (Rogers et al., 2019, 2021).

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, keputusan kebijakan memerlukan penilaian konteks yang komprehensif untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara efisien. Kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang memanfaatkan pemahaman konteks dapat lebih tepat sasaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan dampak positif dari pengelolaan aset daerah. Istilah pengelolaan merupakan sinonim untuk istilah manajemen. Definisi manajemen adalah apa yang dilakukan manajer dalam usahanya mencapai tujuan yang dinyatakan organisasi. Henri Fayol, bapak manajemen modern, mengusulkan lima fungsi yang dilakukan oleh semua manajer, yakni perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Meski pandangan Fayol tersebut diajukan pada 1916, namun banyak buku teks manajemen masih disusun berdasarkan fungsi-fungsi tersebut (Robbins et al., 2013; Robbins & Coulter, 2019). Manajer asset di pemerintah daerah juga melakukan aktivitas tersebut. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 telah secara eksplisit menyatakan sebelas fungsi pengelolaan aset daerah, meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pemahaman konteks memiliki peran krusial dalam pengelolaan aset daerah yang efisien. Dengan memahami konteks, pihak terkait dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik daerah, membantu meningkatkan ketanggapan terhadap dinamika lokal, memastikan alokasi sumber daya yang optimal, dan mengarahkan kebijakan pengelolaan aset yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang efektif. Sebaliknya, pengelolaan aset yang tidak berdasar pada pemahaman konteks dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif seperti inefisiensi penggunaan sumber daya, keputusan terkait pengelolaan aset daerah mungkin tidak tepat sasaran, menghambat kemampuan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat, dan dapat menghambat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pengetahuan tentang konteks bagi pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Konawe Selatan belum tersedia. Menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian ini mencoba untuk menganalisis konteks pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengacu model CIPP Stufflebeam & Coryn (2014), konteks yang mencukupi untuk pengelolaan aset daerah dianalisis dari kesesuaian pemahaman pejabat pengelolaan aset dengan yang didefinisikan dalam literatur, yakni:

- 1) Kebutuhan pengelolaan aset, adalah kontribusi optimal aset daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Akar masalah pengelolaan aset, adalah rintangan yang perlu diatasi dalam mencapai dan menjaga kebutuhan yang ditargetkan, yaitu penerapan manajemen aset yang tidak efisien.
- 3) Peluang pengelolaan aset, adalah ketersediaan teknologi, komitmen pemimpin daerah terkait pendanaan, dan regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah pengelolaan aset.
- 4) Tujuan pengelolaan aset, adalah kondisi-kondisi positif yang diinginkan yang dinyatakan secara terukur dan dapat memandu pilihan nilai publik dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen aset.

## **METODE**

Material atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara yang dibangun berdasarkan pada metode penelitian kualitatif. Alasan penggunaan pendekatan metode kualitatif adalah konteks bagi pengelolaan aset daerah mencakup fenomena *postnormal science* yang sulit untuk diukur empirik dan terkontrol. Penelitian dilakukan pada setting dunia nyata guna menemukan, memahami, dan mendapatkan gambaran secara jelas serta mendalam tentang permasalahan yang terkait topik penelitian. Setting penelitian adalah konteks kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Subyek penelitian adalah pejabat pengelolaan aset daerah. Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada pejabat pengelolaan aset yang ditentukan secara purposif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk Menganalisis Konteks Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan. (Muhammad Elwan et al., 2022)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Empat faktor konteks pengelolaan aset pemerintah daerah yang dicakup dalam penelitian adalah: kebutuhan pengelolaan aset daerah, akar masalah pengelolaan aset daerah, peluang yang tersedia untuk mengatasi kebutuhan, dan tujuan pengelolaan aset

yang dinyatakan dalam kebijakan daerah. Berikut adalah hasil empiris dan analisis terkait faktor-faktor konteks tersebut.

### 1. Kebutuhan pengelolaan aset daerah

Kebutuhan pengelolaan aset yang diakui dalam literatur sektor publik adalah kontribusi optimal aset dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Farazmand, 2018). Diletakkan pada pemerintah daerah, kebutuhan pengelolaan aset adalah kontribusi optimal aset daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Tirayoh et al., 2021). Berdasarkan penelitian ini, kebutuhan pengelolaan aset daerah belum disadari secara baik oleh pengelola aset di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Malahan, kebutuhan pengelolaan aset disamakan dengan masalah dan akar masalah pengelolaan aset. Informasi yang diperoleh adalah:

*Kebutuhan utama pengelolaan aset saat ini adalah penertiban aset melalui perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang optimal. (SH, wawancara 11 Juli 2023).*

*Kebutuhan utama pengelolaan aset saat ini adalah perencanaan yang baik yang memperhatikan kebutuhan di tiap unit pemerintah daerah. (DR, wawancara 18 Juli 2023).*

Dari kedua pernyataan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat kesamaan pandangan terkait kebutuhan utama pengelolaan aset saat ini, yakni manajemen aset yang baik. Perbedaannya hanya pada fungsi manajemen aset yang menjadi penekanan, pernyataan pertama menyebutkan tiga fungsi sedangkan yang kedua menyebutkan satu fungsi manajemen aset, yakni perencanaan yang baik. Selain itu, pernyataan kedua menambahkan dimensi yang lebih spesifik, yaitu fokus pada kebutuhan di setiap unit pemerintah daerah. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang kontekstual dalam pengelolaan aset. Meski demikian, keduanya menyoroti masalah pengelolaan aset, bukan kebutuhan pengelolaan aset sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya.

### 2. Akar masalah pengelolaan aset daerah

Jika kebutuhan pengelolaan aset yang ditargetkan adalah kontribusi optimal aset dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, maka masalah pengelolaan aset mengacu pada rintangan yang perlu diatasi dalam mencapai dan menjaga kebutuhan yang ditargetkan. Secara umum rintangan pengelolaan aset mengacu pada manajemen aset yang tidak efisien (Tirayoh et al., 2021). Fungsi-fungsi manajemen aset ini telah diidentifikasi dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pejabat pengelolaan aset daerah

Kabupaten Konawe Selatan menyadari dengan baik rintangan-rintangan ini. Informasi yang diperoleh adalah:

*Akar masalah pengelolaan aset adalah fungsi-fungsi manajemen aset belum terlaksana secara optimal dan hal ini terkait dengan kewenangan, kebijakan, kompetensi dan moral yang baik (SH, wawancara 11 Juli 2023).*

*Perencanaan kebutuhan aset kurang memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit pemerintah daerah. Sebagian unit mengalami kelebihan aset, yang lainnya kekurangan (DR, wawancara 18 Juli 2023).*

Dari kedua pernyataan, terlihat pemahaman seragam mengenai akar masalah dalam pengelolaan aset, namun ada perbedaan fokus. Pernyataan pertama menyoroti kurangnya implementasi fungsi manajemen aset yang optimal terkait kewenangan, kebijakan, kompetensi, dan moral. Ini menekankan peran kelembagaan, kebijakan, kemampuan, dan etika dalam pengelolaan aset. Pernyataan kedua menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan aset dalam perencanaan tugas dan fungsi di unit pemerintah daerah, dengan ketidakseimbangan antara kelebihan dan kekurangan aset di unit tersebut. Keseluruhan, keduanya mengindikasikan bahwa akar masalah melibatkan implementasi fungsi manajemen aset yang belum optimal, terutama kurangnya perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan aset di tingkat unit pemerintah daerah.

### **3. Peluang untuk mengatasi kebutuhan pengelolaan aset daerah**

Peluang dalam literatur evaluasi konteks mengacu pada potensi, terutama pendanaan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah. Namun, dalam penelitian ini makna peluang diperluas dengan kemungkinan yang muncul dari situasi politik dan kebijakan pemerintah pusat. Peluang untuk mengoptimalkan kontribusi aset daerah telah disadari oleh para pejabat pengelolaan aset di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Informasi yang diperoleh adalah:

*Tersedia beberapa perangkat teknologi seperti aplikasi komputer SIMDA-BMD yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan oleh daerah lain, dan aplikasi inovatif Super Aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan aset yang lebih efisien (RB, wawancara 11 Juli 2023).*

*Ada komitmen yang kuat dari pimpinan pemerintahan daerah, baik Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengoptimalkan anggaran bagi manajemen aset daerah. (SH, wawancara 11 Juli 2023).*

*Kerangka regulasi daerah untuk memandu manajemen aset telah tersedia, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. (DR, wawancara 18 Juli 2023).*

Dari ketiga pernyataan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat cukup peluang bagi pengelolaan aset yang lebih efisien di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Peluang terdiri dari dukungan teknologi, komitmen pemimpin daerah, dan regulasi yang

mendukung pengelolaan aset yang efisien dan terarah. Teknologi pendukung, seperti SIMDA-BMD dan Sistem Informasi Geografis, disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk efisiensi pengelolaan aset. Pemimpin daerah, termasuk Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan anggaran dalam pengelolaan aset daerah, mencerminkan keseriusan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas. Terdapat pula kerangka regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagai panduan hukum untuk pengelolaan aset di Kabupaten Konawe Selatan.

#### 4. Tujuan pengelolaan aset daerah

Tujuan pengelolaan aset daerah mencakup arah (*goals*) dan tujuan (*objectives*). Dalam konteks pengelolaan aset daerah, baik arah maupun tujuan seharusnya dapat dibedakan dari misi dan strategi. Misi adalah pernyataan umum tentang bagaimana organisasi akan mencapai visinya. Strategi adalah serangkaian cara menggunakan misi untuk mencapai visi. *Goals* adalah pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk menerapkan strategi. *Objectives* adalah tindakan spesifik dan jadwal untuk mencapai *goals*. Lagi pula, pernyataan tujuan pengelolaan aset perlu menyediakan konteks untuk membantu pegawai memahami penekanan pengelolaan aset apakah pada instrumen material ataupun nilai publik tertentu. Informasi yang diperoleh adalah:

*Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, tujuan umum kebijakan pengelolaan aset daerah adalah meningkatkan tata kelola aset daerah. (DR, wawancara 18 Juli 2023).*

*Peningkatan tata kelola aset daerah diletakkan di bawah misi ke-3 Pemerintah Daerah, yakni penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. (SH, wawancara 11 Juli 2023).*

Berdasarkan data, tujuan utama kebijakan pengelolaan aset daerah adalah meningkatkan tata kelola aset daerah, sebagaimana tercatat dalam dokumen perencanaan daerah. Peningkatan ini secara spesifik terfokus pada misi ke-3 Pemerintah Daerah, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Data menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan aset daerah dipahami sebagai meningkatkan tata kelola secara holistik, dan ini seharusnya adalah misi pengelolaan aset daerah. Lagi pula, pernyataan tujuan pengelolaan aset sama sekali tidak mencerminkan budaya, nilai, dan etika pemerintah daerah secara umum. Konsekuensinya, dapat saja terjadi, pegawai secara sadar memilih untuk berfokus pada peningkatan instrumen material kebijakan, bukan pada pengejaran nilai publik seperti citra positif pelayanan dan kehandalan organisasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya konteks pengelolaan aset yang ambigu. Konteks pengelolaan aset tergambar sebagai ambigu, dengan

aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan yang diidealkan. Kebutuhan pengelolaan aset yang diidealkan berfokus pada manajemen aset yang efisien, namun persepsi pejabat pengelolaan aset berbeda dari yang diidealkan. Akar masalah pengelolaan aset sesuai dengan yang diidealkan, yaitu implementasi fungsi manajemen aset yang belum optimal. Peluang pengelolaan aset seperti ketersediaan teknologi, komitmen pemimpin daerah, dan regulasi, adalah sesuai dengan yang diidealkan. Tujuan pengelolaan aset yang diidealkan tidak sesuai dengan persepsi pejabat pengelolaan aset dan tidak memandu pilihan nilai publik. Perbedaan persepsi antara kebutuhan, akar masalah, peluang, dan tujuan pengelolaan aset dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas dalam pengelolaan aset daerah.

Temuan tentang aspek-aspek konteks pengelolaan aset daerah yang ambigu di lokasi penelitian ini tidak konsisten dengan teori konteks dari Michaud & Michaud (Michaud & Michaud, 2008). Teori ini memprediksikan pengaruh positif dari konteks yang baik bagi efisiensi pengelolaan aset. Konteks yang baik dapat memastikan bahwa pemanfaatan optimal dari sumber daya oleh pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Kenyataannya, deskripsi dari konteks pengelolaan aset menunjukkan adanya ketidakjelasan, dengan beberapa aspek yang sesuai dan beberapa aspek yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

Ketidakjelasan dalam konteks pengelolaan aset di lokasi penelitian ini dapat berdampak negatif pada efisiensi, pengelolaan risiko, dan pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah daerah dalam memaksimalkan kontribusi optimal aset daerah. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya (Rogers et al., 2019, 2021), faktor konteks penting bagi implementasi kebijakan yang sukses, dan ini tentu berlaku bagi kebijakan pengelolaan aset daerah. Lagi pula, seperti yang ditegaskan oleh Msongole et al. (2022), pentingnya mempromosikan pengelolaan aset publik yang efisien diakui sebagai hal yang mendesak bagi semua pemerintah daerah, dengan tujuan utama mencapai nilai optimal aset untuk keuntungan organisasi dan pemangku kepentingan.

Tren desentralisasi akan terus meningkatkan pemilikan aset di pemerintah daerah. Sejatinya, peningkatan aset akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, perluasan pilihan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat (Hanis et al., 2018). Namun, tanpa pengelolaan yang baik, harapan-harapan ini akan terus menjadi utopia. Nilai ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan dari peningkatan dan pengelolaan aset (International Organization of Supreme Audit Institutions, 2019) akan sulit terwujud jika keputusan kebijakan pengelolaan aset dibuat tanpa memanfaatkan penilaian konteks yang tepat. Implikasi teoritisnya mencakup perlunya mempertimbangkan variabilitas konteks lokal dan dinamika yang kompleks dalam memahami hubungan antara konteks dan efisiensi pengelolaan aset.



Implikasi ini menegaskan pentingnya mengkaji dan menyesuaikan teori serta praktik pengelolaan aset dengan konteks lokal yang spesifik. Hal ini dapat memandu perbaikan praktis dalam efisiensi pengelolaan aset pemerintah daerah dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam konteks pengelolaan aset daerah, dengan perbedaan antara idealitas dan kenyataan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori konteks Michaud & Michaud (2008), yang mengindikasikan dampak positif konteks yang baik terhadap efisiensi pengelolaan aset. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan efisiensi, pengelolaan risiko, dan pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah daerah. Implikasi teoritis dan praktisnya menunjukkan perlunya penyesuaian teori dan praktik pengelolaan aset dengan konteks lokal, mendukung upaya peningkatan efisiensi dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Alam, S., Ruffini, L. O. M., & Bake, J. (2016). Government Spending and People Welfare; in Southeast Sulawesi, Indonesia. *The International Journal of Engineering and Science*, 5(11), 78–85. <https://doi.org/10.9790/1813-0511027885>
- Almeida, N., Trindade, M., Komljenovic, D., & Finger, M. (2022). A conceptual construct on value for infrastructure asset management. *Utilities Policy*, 75(October 2019), 101354. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101354>
- Farazmand, A. (Ed.). (2018). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20928-9>
- Gross, S. (2013). What is a Context? In A. Capone, F. Piparo, & M. Carapezza (Eds.), *Perspectives on Pragmatics and Philosophy* (pp. 113–132). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-01011-3\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-01011-3_5)
- Hanis, M. H., Trigunaryah, B., & Susilawati, C. (2018). Public asset management framework for local governments: Opportunities and challenges for public asset managers. *Proceedings of the 2nd International Postgraduate Conference on Infrastructure and Environment, IPCIE 2018*, 2(January), 132–142.
- International Organization of Supreme Audit Institutions. (2019). *GUID INTOSAI 5260: Governance of Public Assets*.
- Michaud, R. O., & Michaud, R. O. (2008). Efficient asset management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation. In *NBER Working Papers (Second)*. Oxford University Press.
- Msongole, S. S., Bakuwa, R. C., & Mkandawire, B. O. B. (2022). Assessing the level of application of physical asset management core practices at water boards in Malawi. *Heliyon*, 8(11), e11614. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11614>
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM

---

PENANGGULANGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWA. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2019). *Management (activebook)*, 7/e.

Robbins, S. P., Decenzo, D. A., & Coulter, M. (2013). *Fundamentals Of Management: Essential Concepts and Applications* (8th ed.). Pearson Education, Inc.

Rogers, L., De Brún, A., Birken, S. A., Davies, C., & McAuliffe, E. (2021). Context counts: a qualitative study exploring the interplay between context and implementation success. *Journal of Health Organization and Management*, 35(7), 802–824. <https://doi.org/10.1108/JHOM-07-2020-0296>

Rogers, L., De Brún, A., & McAuliffe, E. (2019). Assessing the impact of context during the implementation of a co-designed, collective leadership intervention. *International Journal of Integrated Care*, 19(4), 142. <https://doi.org/10.5334/ijic.s3142>

Satrianto, A., Candrianto, C., Gusti, M. ayu, Juniardi, E., & Novenica, M. (2019). Analysis of the Effect of Asset Growth, Profitability, and Company Size on Capital Structure (Empirical Study in Mining Sector Companies in Indonesia Stock Exchange). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 97(Piceeba), 85–92. <https://doi.org/10.2991/piceeba-19.2019.10>

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (Second). John Wiley & Sons, Inc.

Tirayoh, V. Z., Latjandu, L. D., Sabijono, H., & Mintardjo, C. M. O. (2021). Public Sector Asset Management in the Government of Indonesia: A Case Study in Minahasa Regency. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 195–205. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.195-205>